



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD ) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alamat : Jl.Wolter Monginsidi No.1 Telp : (0541)-6724936 Fax : (0541)-6724936

Website : [www.dprdkutaikartanegara.go.id](http://www.dprdkutaikartanegara.go.id) E-mail : [setwan@dprdkutaikartanegara.go.id](mailto:setwan@dprdkutaikartanegara.go.id) Kode Pos : 75511

### NOTULENSI RAPAT

Tanggal : 24 Februari 2025  
Tempat : DPMPTSP Kota Tangerang Selatan  
Perihal : Rapat Kerja Pansus Raperda Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko di DPMPTSP Kota Tangerang Selatan

### RESUME KEGIATAN

Haris Jaya Prawira Sekretaris Dinas DPMPTSP Kota Tangerang Selatan	: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tahun 2008 ada pemekaran menjadi Kota Tangerang Selatan pecahan dari Kota Tangerang</li><li>- DPMPTSP merupakan unit kerja dari Pemda yang memiliki urusan wajib terkait penanaman modal di wilayah Kota Tangerang Selatan</li><li>- Hingga saat ini belum ada Perda terkait penyelenggaraan perizinan berbasis resiko, bahkan belum ada melakukan rancangan</li><li>- Tahun 2018 pendelagasian perizinan dikumpulkan di DPMPTSP</li><li>- Perizinan yang dikelola oleh DPMPTSP Kota Tangsel ada 64 perizinan melalui pendelegasian perizinan</li><li>- Simponi (aplikasi) yang dibuat untuk proses semua perijinan di DPMPTSP</li><li>- Unit-unit kerja di wilayah Kecamatan untuk di Kota Tangerang Selatan tidak ada, namun kami memiliki Kerjasama dengan Go Jek dahulu dengan Kantor Pos.</li></ul>
Sapto Pratoyo Ketua Pokja Pengedalian Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pada dasarnya DPMPTSP Kota Tangel hanya menjalankan perturan, dan tidak membuat peraturan.</li><li>- Di Kota Tangsel untuk peraturan ada di dinas-dinas yang bersifat teknis</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tekait pengawasan kami melibatkan OPD teknis, DPMPTSP sebagai Koordinator menggali semua permasalahan yang ada</li> <li>- Fakta dilapangan banyak kegiatan usaha yang tidak sesuai KBLI, untuk kejadian tersebut kami hanya memberikan arahan kepada pelaku usaha untuk memperbaiki sesuai dengan aturan yang ada</li> <li>- Tahun selanjutnya kami melakukan pengawasan Kembali, untuk memastikan apa yang telah diatur jika masih saja tidak sesuai kami bisa melakukan pembekuan hingga pencabutan perijinan</li> <li>- PBG kami melakukan pengawasan bersama Satpol PP untuk memastikan perizinannya, kemudian pra proses perijinan dilakukan oleh Satpol PP Kota Tangsel, pada saat Proses ijinnya di DPMPTSP, pasca perijinan kami bersama dinas teknis terkait untuk melakukan pengawasan.</li> </ul>
Budiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ria Handayani (Grindra)</li> <li>- Erwin (Golkar)</li> <li>- H. M Hidayat (PKS)</li> <li>- Madina (PDIP)</li> <li>- Hj. Masniah (PDIP)</li> <li>- Rahmat Darmawan (PDIP)</li> <li>- Hamdiah (Nasdem)</li> <li>- H. Fahrudin (PAN)</li> <li>- Budiman (Golkar)</li> <li>- Tujuan datang ke DPMPTSP Kota Tangerang Selatan ini pertama kali nya datang ke Kota Tangerang Selatan, sebelumnya kami sudah ada kunjungan ke DPMPTSP DKI Jakarat.</li> <li>- Geografis wilayah Kota Tangsel dan Kabupaten Kutai Kartanegara berbeda jauh, lebih luas Kab Kutai Kartanegara</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada beberapa kendala yang kami hadapi dalam proses penerapan penyelenggaraan perizinan berbasis resiko</li> <li>- Terkait dengan bangunan PBG bagaimana mekanisme perijinannya</li> <li>- Di Kab Kutai Kartanegara sangat memerlukan Perda ini karena mengingat luasan wilayah Kab Kutai Kartanegara dengan kondisi pelayanan berbasis digital jika dikaitkan perijinan ini maka Perda tersebut sangat diperlukan.</li> <li>-</li> </ul>
--	---